

ABSTRAK

Tingkat urbanisasi yang terus meningkat, memberikan dampak terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hunian yang layak. Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan memberikan dampak timbulnya kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal No.600/17/2022 permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Bandengan yaitu 8.275 m². Rendahnya kinerja infrastruktur dasar sebagai penunjang aktivitas masyarakat, mengakibatkan upaya penganan permukiman kumuh belum bisa terselesaikan. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan perilaku dan kondisi geografis dari permukiman yang berada di Pesisir Utara Laut Jawa dengan ancaman rob. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis zona prioritas berdasarkan kinerja infrastruktur lingkungan yang tersedia dalam penanganan kekumuhan di Kelurahan Bandengan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena efektivitas penyediaan dan kinerja infrastruktur dasar merupakan komponen yang penting untuk memberikan dampak pada kelancaran aktivitas Masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif untuk mengukur tingkat keefektifan kinerja infrastruktur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis skoring dan pemetaan. Selain itu, diperlukan analisis Korelasi Pearson untuk menguji hubungan antara kinerja infrastruktur dengan status kumuh, sebagai dasar penentuan zona penanganan kekumuhan permukiman berdasarkan kinerja infrastruktur.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa permasalahan kinerja infrastruktur yang telah tersedia di Kelurahan Bandengan. Ditemukan bahwa 67,64% kawasan memiliki jaringan jalan yang tidak optimal, disebabkan oleh kerusakan dan lebar jalan yang <2 meter. Selain itu, 3,03% kawasan permukiman menghadapi masalah air limbah dan sanitasi karena kurangnya saluran pemisah dari aktivitas MCK. Hasil analisis kedua menunjukkan, 100% kawasan tanpa saluran drainase optimal, disebabkan oleh kerusakan struktur, sumbatan tanah, sampah, dan tumbuhan yang menyebabkan genangan lebih dari 2 kali setahun. Sedangkan infrastruktur persampahan, dimana 57,41% kawasan tidak memiliki sarana persampahan optimal karena terdapat timbulan sampah di lingkungan permukiman. Kurangnya ruang terbuka hijau mempengaruhi 100% kawasan yang tidak dapat dilayani oleh RTH sebagai ruang publik dan sosial. Sementara itu, ketahanan terhadap kebakaran juga rendah, dimana 100% kawasan tanpa sarana dan prasarana proteksi sesuai standar teknis. Penelitian juga menunjukkan rendahnya nilai zona-zona permukiman dalam menghadapi ancaman rob yang terjadi setiap tahun, dengan 26,12% kawasan memiliki ketahanan infrastruktur yang dapat diklasifikasikan sebagai rendah-cukup. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan kesadaran masyarakat yang terklasifikasi pada kategori rendah-sedang, karena tidak adanya lembaga yang terbentuk sebagai kontrol penyediaan dan kualitas infrastruktur. Dari hasil penilaian tersebut, terdapat tiga klasifikasi zona prioritas pengoptimalan kinerja infrastruktur. Zona prioritas pengoptimalan I seluas 0,92 hektar, pengoptimalan II seluas 15,72 hektar dan pengoptimalan III seluas 37,18 hektar. Adanya hubungan kuat antara kinerja infrastruktur dengan status kumuh, memberikan konsekuensi terhadap pengutamakan pengoptimalan kinerja infrastruktur di pada kawasan dengan status kumuh. Zona prioritas pengoptimalan infrastruktur yang berada di kawasan permukiman dengan status kumuh akan menjadi lokasi utama dalam penanganan kekumuhan. Hasil akhir menunjukkan adanya tiga zona prioritas penanganan kekumuhan yaitu zona prioritas penanganan kekumuhan I seluas 0,92 hektar, penanganan kekumuhan II 14,46 hektar dan penanganan III 38,26 hektar. Dengan diketahuinya kawasan yang memiliki urgensi penanganan, diharapkan program pengurangan permukiman kumuh melalui peningkatan kinerja infrastruktur dapat lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Kinerja Infrastruktur, Kekumuhan, Zona Prioritas